

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kondisi Inflasi Januari 2026

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Barat di lima kabupaten/kota, pada Januari 2026 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,33 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,57 pada Januari 2025 menjadi 109,09 pada Januari 2026. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,27 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,27 persen.

Pada tingkat Nasional terjadi inflasi *month-to-month* (m-to-m) sebesar -0,15 persen lebih rendah dari inflasi *month-to-month* (m-to-m) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,27.

Sedangkan inflasi year-on-year (y-on-y) Nasional sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dari inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,33 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,05 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,56 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 13,85 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,49 persen; kelompok transportasi sebesar 1,74 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,30 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,53 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,97 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,48 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,69 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,44 persen.

Pada Januari 2026, sembilan kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,70 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,75 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,50 persen; kelompok transportasi sebesar 0,20 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Januari 2026, antara lain: tarif listrik, emas perhiasan, beras, ikan kembung, ikan baung, angkutan udara, ikan nila, telur ayam ras, mobil, sigaret kretek mesin (SKM), ikan bandeng, bahan bakar rumah tangga, bimbingan belajar, sigaret putih mesin (SPM), dan kopi bubuk. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: bawang putih, daging babi, sabun detergen bubuk, sawi hijau, ketimun, telepon seluler, kentang, tomat, kangkung, ikan bawal, kacang panjang, cabai rawit, jahe, pembersih lantai, pengharum cucian/pelembut dan susu bubuk balita.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Januari 2026, antara lain: daging ayam ras, emas perhiasan, ikan nila, jeruk, sigaret putih mesin

(SPM), ikan baung, ikan bawal, dan cumi-cumi. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: ketimun, semangka, ikan tongkol, bensin, dan wortel.

Pada Januari 2026, seluruh kota IHK yang berjumlah lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Sintang sebesar 4,52 persen dengan IHK sebesar 109,05. Sementara itu, inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 2,74 persen dengan IHK sebesar 108,00.

Kondisi Inflasi Februari 2026

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Barat di lima kabupaten/kota, pada Februari 2026 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,90 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,53 pada Februari 2025 menjadi 109,65 pada Februari 2026. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,51 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,78 persen.

Pada tingkat Nasional terjadi inflasi *month-to-month* (m-to-m) sebesar 0,68 persen lebih tinggi dari inflasi *month-to-month* (m-to-m) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,51.

Sedangkan inflasi year-on-year (y-on-y) Nasional sebesar 4,76 persen, lebih tinggi dari inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,90 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,53 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,56 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 19,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,50 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,31 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,53 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,98 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,28 persen. Sementara itu, tiga kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,42 persen; kelompok transportasi sebesar 0,23 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,35 persen.

Pada Februari 2026, delapan kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,24 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,93 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,56 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara itu, tiga kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga masing-masing sebesar 0,02 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,03 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Februari 2026, antara lain: tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, ikan kembung, bawang merah, ikan baung, ikan nila, telur ayam ras, mobil, sigaret kretek mesin (SKM), ikan tongkol, ikan bandeng, sigaret putih mesin (SPM), bimbingan belajar, bahan bakar rumah tangga, dan cumi-cumi. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara

lain: cabai rawit, angkutan udara, kangkung, sawi hijau, udang basah, daging babi, bawang putih, kentang, bensin, sabun detergen bubuk, wortel, bayam, cabai merah, ketimun, telepon seluler dan jeruk.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Februari 2026, antara lain: daging ayam ras, emas perhiasan, angkutan udara, bawang putih, bawang merah, ikan nila, ikan tongkol, daging sapi, dan ikan bandeng. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: sawi hijau, cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, bensin dan jeruk.

Pada Februari 2026, seluruh kota IHK yang berjumlah lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Sintang sebesar 5,12 persen dengan IHK sebesar 109,66, sedangkan inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 3,44 persen dengan IHK sebesar 108,62.

Kondisi Inflasi Maret 2026

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Barat di lima kabupaten/kota, pada Maret 2026 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,89 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,83 pada Maret 2025 menjadi 109,92 pada Maret 2026. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,25 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,03 persen.

Pada tingkat Nasional terjadi inflasi *month-to-month* (m-to-m) sebesar 0,41 persen lebih tinggi dari inflasi *month-to-month* (m-to-m) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,25.

Sedangkan inflasi year-on-year (y-on-y) Nasional sebesar 4,76 persen, lebih tinggi dari inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,90 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,72 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,47 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 6,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,49 persen; kelompok transportasi sebesar 2,43 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,29 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,89 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,98 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,84 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,44 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen.

Pada Maret 2026, sembilan kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,00 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,88 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,52 persen; kelompok transportasi sebesar 0,28 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,11 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen; serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga masing-masing

sebesar 0,02 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Maret 2026, antara lain: tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, angkutan udara, beras, telur ayam ras, ikan baung, ikan nila, ikan tongkol, bawang merah, ikan bandeng, mobil, sigaret kretek mesin (SKM), ikan kembung, sigaret putih mesin (SPM), cumi-cumi, ikan tenggiri, bimbingan belajar, daging sapi, bahan bakar rumah tangga, sepeda motor, minyak goreng, kopi bubuk, dan kol putih/kubis. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: cabai rawit, cabai merah, bawang putih, daging babi, udang basah, sabun detergen bubuk, bayam, kentang, kangkung, wortel, bensin, jeruk, semangka, telepon seluler, terong, ikan bawal, dan pengharum cucian/pelembut.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Maret 2026, antara lain: telur ayam ras, cabai rawit, angkutan udara, udang basah, sawi hijau, gula pasir, kacang panjang, kol putih/kubis, bensin, buncis, kangkung, minyak goreng, cumi-cumi, ikan bandeng, ketimun, kursus bahasa asing, dan daging sapi. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: daging ayam ras, ikan kembung, bawang merah, dan wortel.

Pada Maret 2026, seluruh kota IHK yang berjumlah lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Sintang sebesar 3,13 persen dengan IHK sebesar 109,88, sedangkan inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Singkawang sebesar 2,69 persen dengan IHK sebesar 109,49.

Prakiraan Resiko Inflasi Kalimantan Barat ke Depan

Memasuki Triwulan II tahun 2026, stabilitas ekonomi daerah menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dengan beberapa risiko utama, diantaranya:

- Gangguan iklim dan cuaca dampak intensitas El Nino meningkatkan risiko penurunan produksi pangan. Prakiraan musim kemarau tahun 2026 yang mulai lebih awal sehingga akan memengaruhi produksi pangan khususnya beras, ikan, dan hortikultura, terutama mengingat keterbatasan kesiapan irigasi Kalbar di mana sebagian besar lahan masih bergantung pada sistem tadah hujan sehingga berisiko menurunkan indeks pertanian. Sejalan dengan itu, percepatan tanam padi maksimal 15 (lima belas) hari pasca panen April 2026 menjadi strategi mitigasi efektif dalam menjaga kesinambungan produksi di wilayah non-irigasi.
- Gangguan pasokan minyak global akan berdampak pada kenaikan harga energi. Kenaikan harga BBM, termasuk avtur yang sejak awal April 2026 telah meningkat hingga 70%, berisiko turut meningkatkan harga angkutan udara. Pada tanggal 6 April 2026, Pemerintah secara resmi menaikkan tarif batas atas tiket penerbangan sebesar 9-13%. Di sisi angkutan darat, pada 1 April 2026 Pemerintah mulai melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi, ke depan dengan kemampuan fiskal APBN yang mulai terbatas maka kenaikan harga BBM domestik berisiko meningkat;
- Risiko kecukupan pasokan pangan pasca akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Beberapa komoditi yang berisiko mengalami kenaikan harga antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, sayuran, dan kedelai, termasuk susu UHT yang sudah terpantau langka;
- Penurunan Dana Transfer ke Daerah mendorong beberapa Pemda menerapkan kebijakan peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak/Retribusi untuk menutup defisit fiskal. Kenaikan tarif perlu dikaji cermat agar dampaknya minimal terhadap risiko

kenaikan harga pangan di masyarakat;

Meski pada triwulan II 2026 inflasi diperkirakan meningkat, namun pada April 2026 diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan Maret 2026 dengan beberapa faktor antara lain: Normalisasi permintaan masyarakat paska Ramadhan dan Idul Fitri, Kenaikan harga emas global yang tertahan, Pemerintah masih mempertahankan harga BBM domestik sehingga meredam risiko kenaikan biaya logistik.

Secara keseluruhan tahun 2026, Inflasi Kalimantan Barat diperkirakan masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Berbagai upaya pengendalian inflasi secara konsisten terus dilakukan melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Pemetaan neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan Kalimantan Barat perlu diperkuat khususnya untuk komoditas yang mendukung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sejalan dengan poterni peningkatan realisasi SPPG hingga tahun 2026, salah satunya didorong melalui *business matching* antara produsen pangan (Gapoktan/Poktan) dan/atau agregator (Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih/KDKMP).

Inflasi Kalimantan Barat secara tahunan di tahun 2026 diperkirakan akan tetap stabil dalam kisaran target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Berbagai upaya terus dilakukan dalam menjaga inflasi Kalimantan Barat pada rentang target inflasi nasional guna mendukung kualitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Terjaganya inflasi IHK yang terkendali tidak terlepas dari sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta berbagai mitra strategis dalam menjaga laju inflasi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada bulan Januari 2026, Kalimantan Barat mencatatkan inflasi m-to-m sebesar 0,27 persen. Penyumbang utama inflasi Januari 2026 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 0,16 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah komoditas daging ayam ras. Kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh peningkatan permintaan yang lebih besar dibandingkan pasokan. Selain konsumsi rumah tangga, permintaan daging ayam ras juga diperkirakan meningkat seiring dengan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Januari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat tercatat meningkat sekitar 150 persen dibandingkan Desember 2025, sehingga turut menambah tekanan permintaan terhadap komoditas tersebut.

Selain daging ayam ras, emas perhiasan juga memberikan andil terhadap inflasi bulanan. Kenaikan harga emas perhiasan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga emas dunia serta faktor nilai tukar, yang kemudian berdampak pada harga emas di tingkat konsumen.

Secara tahunan (year-on-year/y-on-y), Kalimantan Barat mencatat inflasi sebesar 3,33 persen. Inflasi Januari 2026 (y-on-y) ini relatif lebih tinggi, antara lain dipengaruhi oleh efek dasar (*low base effect*) dari kebijakan pemerintah pada Januari-Februari 2025 berupa potongan biaya listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Kebijakan tersebut menurunkan tingkat harga pada periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga mendorong inflasi tahunan pada Januari 2026.

Penyumbang utama inflasi Januari 2026 secara y-on-y berasal dari Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, dengan andil sebesar 1,68 persen. Inflasi tahunan terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, antara lain tarif listrik, emas perhiasan, beras, ikan kembung, ikan baung, tarif angkutan udara, ikan nila, dan telur ayam ras.

Pada bulan Februari 2026, inflasi IHK Kalimantan Barat terjaga stabil sebesar 0,51% (mtm) dan 3,90% (yoy). Realisasi inflasi didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, beberapa komoditas pendorong inflasi utama adalah: daging ayam ras (andil 0,13% mtm), bawang putih (andil 0,04% mtm) dan bawang merah (andil 0,04% mtm). Kenaikan harga komoditas daging ayam ras, bawang merah dan bawang putih secara umum disebabkan peningkatan permintaan selama HBKN Imlek dan awal Ramadan dengan kemampuan produksi lokal yang terbatas.

Pada bulan Februari 2026, permintaan harian daging ayam ras tercatat 222,52 ton, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 217,25 ton. Kondisi tersebut masih delisit dibandingkan kapasitas produksi lokal yang tercatat sebesar 196,9 ton. Kenaikan harga daging ayam juga dipengaruhi harga pakan ternak yang masih stabil tinggi di level Rp6.896/kg. Selain itu kondisi sentra pasokan ayam ras di Singkawang belum pulih pasca kenaikan permintaan HBKN Nataru tahun lalu. Sementara itu, komoditas bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan produksi karena sudah melewati musim panen. Di sisi lain, laju inflasi Kalimantan Barat tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas yaitu sawi hijau (andil 0.04%) dan cabai rawit (andil -0,03%), dipengaruhi peningkatan pasokan seiring kondisi cuaca.

Pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, komoditas pendorong inflasi utama adalah emas perhiasan (andil 0,09% mtm). Kenaikan inflasi emas dunia disebabkan ekspektasi keputusan bank: sentral AS untuk menurunkan suku bunga, kenaikan permintaan emas fisik oleh bank sentral serta peningkatan masyarakat terhadap aset *safe haven* seiring tensi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang semakin intensif.

Pada bulan Maret 2026, Kalimantan Barat mencatatkan inflasi m-to-m sebesar 0,25 persen. Penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,13 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah telur ayam ras, cabe rawit, udang basah, sawi hijau, gula pasir, kacang panjang, kol/kubis, buncis, kangkung dan minyak goreng.

Selain kelompok makanan, tarif angkutan udara juga menjadi komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi bulanan. Penyebab kenaikan tersebut terjadi karena bulan Maret bertepatan dengan momen libur idul fitri yang mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat secara signifikan, sehingga hal ini mengakibatkan permintaan terhadap akses transportasi udara melonjak. Pada kelompok transportasi, komoditas pendorong inflasi utama adalah angkutan udara (andil 0,04% mtm). Kenaikan inflasi angkutan udara disebabkan oleh kenaikan permintaan tiket periode Idulfitri (arus mudik/balik), serta kenaikan harga avtur di Bandara Supadio (PNK) sebesar 3,61% (mtm) per 1 Maret 2026, meskipun Pemerintah telah memberikan stimulus diskon tarif sebesar 18% pada 14 s.d 29 Maret 2026

Kenaikan harga komoditas telur ayam ras, cabai rawit, dan udang basah secara umum disebabkan peningkatan permintaan selama HBKN Ramadan dan idulfitn dengan kemampuan

produksi lokal yang terbatas. Tekanan harga telur turut dipicu oleh tambahan kebutuhan SPPG yang mencapai sekitar 752 ton per bulan. Sementara itu, kenaikan harga cabai rawit disebabkan terbatasnya stok karena belum memasuki masa panen lokal serta keterlambatan pasokan dari Jawa. Adapun kenaikan harga udang basah dipengaruhi oleh peningkatan salinitas air akibat kemarau dan intrusi air laut yang mempengaruhi hasil panen. Di sisi lain, laju inflasi Kalimantan Barat tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas yaitu daging ayam ras (andil -0,16%) dan ikan kembung (andil -0,06%), dipengaruhi akibat normalisasi pasokan dari daerah sentra seperti Singkawang dan Punggur di tengah permintaan HBKN Ramadan dan Idulfitri, serta melimpahnya tangkapan ikan yang didukung kondisi cuaca dan gelombang perairan yang kondusif seiring puncak musim tangkap di Mempawah dan Ketapang.

Jika dilihat data secara tahunan (y-on-y), Kalimantan Barat mengalami inflasi sebesar 2,89 persen. Inflasi tahunan ini terutama dipengaruhi oleh komoditas tarif listrik dan emas perhiasan. Imbas dari *low base effect* pada tarif listrik dan harga emas domestik yang bergerak fluktuatif, namun masih menunjukkan tren peningkatan harga mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Catatan Peristiwa yang mempengaruhi Inflasi bulan Januari 2026

- **Tarif Listrik** : PT PLN (Persero) mendukung penuh keputusan Pemerintah melalui Kementerian ESDM yang menetapkan tarif listrik pada Triwulan I (Januari-Maret) 2026 tidak mengalami kenaikan. Terjadi *Low Base Effect* dimana Pada Januari-Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA;
- **Harga Emas Dunia Terus Menunjukkan Tren Positif** : Pada Januari 2026 harga emas telah naik 28,77 persen dibandingkan bulan lalu dan naik 102,14 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Harga emas domestik menembus rekor tertinggi Rp3 juta per gram;
- **Permintaan Daging Ayam Ras Tinggi** : Permintaan daging ayam ras selain dari masyarakat diperkirakan juga untuk memenuhi kebutuhan protein pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat Januari 2026 meningkat 150 persen dibandingkan Desember 2025;
- **Perkembangan Harga BBM Nonsubsidi** : Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada Januari 2026. Pertamina turun Rp. 400,- menjadi Rp 12.650 per liter Pertamina Turbo turun Rp. 300,- menjadi Rp 13.700 per liter Dexcelite (CN 51) turun Rp. 1.200,- menjadi Rp 13.800 per liter Pertamina Dex (CN 53) turun Rp. 1.400,- menjadi Rp 13.900 per liter;
- **Produksi Padi Meningkat** : Berdasarkan amatan Kerangka Sampel Area (KSA) pada Januari 2026, diperkirakan potensi produksi padi gabah kering giling (GKG) di Kalimantan Barat, mengalami peningkatan sekitar 25 persen dibandingkan Januari 2025.

Catatan Peristiwa yang mempengaruhi Inflasi bulan Februari 2026

- **Imlek dan Ramadhan** : Perayaan Imlek dan Ramadhan pada waktu yang bersamaan mendorong meningkatnya permintaan berbagai komoditas barang dan jasa seperti daging ayam ras, daging sapi, produk hortikultura, hingga angkutan udara;
- **Bahan Bakar Minyak (BBM)**
 - **Penyesuaian Harga** : Pada Februari 2026, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi berupa penurunan harga sebesar Rp100,- hingga Rp700,-

per liter

- **Distribusi Terganggu** : Surutnya debit air Sungai Kapuas mengganggu distribusi BBM ke wilayah hulu;
- **Harga Emas Dunia Mengalami Fluktuasi** : Pada awal Februari 2026, harga emas sempat mencapai puncaknya sebelum mengalami koreksi ringan, namun masih berada pada level yang relatif tinggi;
- **Tarif Listrik** : Pada Januari-Februari 2025, pemerintah memberlakukan diskon tarif listrik 50 persen untuk pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA.

Catatan Peristiwa yang mempengaruhi Inflasi bulan Maret 2025

- **Hari Besar Keagamaan Nasional** : Puncak perayaan Cap Go Meh Nasional tanggal 3 Maret 2026 yang dipusatkan di Kota Singkawang, Hari Raya Nyepi tanggal 19 Maret 2026, Idul Fitri 1447 H yang jatuh pada tanggal 21 Maret 2026;
- **Cuti Bersama** : Pemerintah menetapkan cuti bersama Idul Fitri 1447 H tanggal 18-24 Maret 2026;
- **Work Form Anywhere (WFA)** : Pemerintah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk ASN dan himbauan bagi swasta selama 5 hari pada Idul Fitri 2026: 16-17 Maret dan 25-27 Maret;
- **Diskon Tarif Transportasi pada Idul Fitri 2026** : Kebijakan pemerintah memberikan diskon tiket pesawat sebesar 17 - 18 persen untuk periode keberangkatan 14 - 29 Maret, serta diskon tiket kapal laut hingga 30 persen untuk periode keberangkatan 11 Maret - 5 April;
- **Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi** : Pertamina resmi menaikkan harga seluruh BBM nonsubsidi pada 1 Maret 2026. Kenaikan bervariasi mulai dari Rp 200,- hingga Rp 950,- per liter;
- **Penurunan Harga Emas Dunia Pada Maret 2026** : harga emas mengalami koreksi hingga turun ke level Rp 2,8 juta/gram setelah sebelumnya sempat mencapai puncaknya di kisaran level Rp 3,1 juta/gram pada Januari 2026.

Berdasarkan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok (Neraca Pangan) Provinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, hanya komoditas kedelai yang mengalami defisit selama Triwulan I Tahun 2026. Hingga akhir Triwulan I 2026, komoditas beras masih mengalami surplus sebanyak 246.297 ton.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Ketahanan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu upaya untuk memperkuat rantai sistem distribusi pangan dalam pengendalian pasokan dan harga pangan, meningkatkan akses pangan dengan harga yang terjangkau dan murah bagi konsumen dan masyarakat di Kalimantan Barat.

Adapun capaian kinerja GPM melalui anggaran perubahan hingga Triwulan ke-I tahun 2026 disimpulkan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan terelaisasinya kegiatan yaitu : Belanja Persediaan untuk dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat.

Belanja Persediaan untuk dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat adalah berupa belanja Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang dilakukan melalui pemberian subsidi harga beberapa komoditas bahan pangan strategis, dengan demikian harga jual yang dibayarkan kepada masyarakat lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Besaran selisih harga subsidi tergantung pada kemampuan keuangan. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 448.000.000,-, Pagu anggaran sampai dengan Triwulan ke- I sebesar Rp 280.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 147.908.100,- atau 52,82 %.

No.	Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Harga Pangan	Perkiraan Ketersediaan				Perkiraan Ketersediaan		Rasio Rp (Harian)
		Produksi	Pasokan	ke wilayah lain	Perkiraan Ketersediaan	Perkiraan Ketersediaan	Perkiraan Ketersediaan	
1	Beras	197.554	86.301	27.745	40	311.560	65.262	246.297
2	Jagung	70.247	8.807	2.567	-	81.421	11.346	70.076
3	Bawang Merah	176	12,51	1.260	-	1.448	1.204	245
4	Bawang Putih	307	-	1.191	-	1.498	1.103	395
5	Cabai Besar	32	206	200	-	438	356	91
6	Cabai Kecil	338	1294	209	-	1.842	669	1.172
7	Daging Sapi	7.979	8.082	1.801	-	17.858	8.283	9.575
8	Daging Ayam Ras	4.639	5.986	1.440	-	8.725	5.889	3.836
9	Gula Pasir	214.431	25.244	21.590	-	219.525	4.662	214.862
10	Minyak Goreng	-	-	-	-	-	-	-
11	Susu	-	-	-	-	-	-	-
12	Terigu	-	-	-	-	-	-	-
13	Ubi Jalar	-	-	-	-	-	-	-
14	Ubi Kayu	-	-	-	-	-	-	-
15	Ubi Merah	-	-	-	-	-	-	-
16	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
17	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
18	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
19	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
20	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
21	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
22	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
23	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
24	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
25	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
26	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
27	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
28	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
29	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
30	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
31	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
32	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
33	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
34	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
35	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
36	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
37	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
38	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
39	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
40	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
41	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
42	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
43	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
44	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
45	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
46	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
47	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
48	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
49	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
50	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
51	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
52	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
53	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
54	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
55	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
56	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
57	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
58	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
59	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
60	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
61	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
62	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
63	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
64	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
65	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
66	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
67	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
68	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
69	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
70	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
71	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
72	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
73	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
74	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
75	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
76	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
77	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
78	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
79	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
80	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
81	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
82	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
83	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
84	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
85	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
86	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
87	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
88	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
89	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
90	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
91	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
92	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
93	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
94	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
95	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
96	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-
97	Ubi Ungu	-	-	-	-	-	-	-
98	Ubi Hitam	-	-	-	-	-	-	-
99	Ubi Kuning	-	-	-	-	-	-	-
100	Ubi Putih	-	-	-	-	-	-	-

Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu). Adapun Komoditi utama yang telah disalurkan meliputi Beras (78.250 Kg), Minyak Goreng (15.650 Liter) dan Gula Pasir (15.650 Kg).

Dalam rangka mengoordinasikan Strategi 4K (kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, kestabilan harga dan komunikasi efektif) pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Imlek, Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar *High Level Meeting* (HLM) TPID se-Kalimantan Barat pada tanggal 5 Februari 2026 bertempat di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat hadir dan memimpin HLM. Adapun arahan Gubernur pada HLM tersebut sebagai berikut :

- Mendata ketersediaan stok dan harga bahan pangan;
- Melakukan pengendalian dan tindakan preventif terhadap potensi terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan;
- Memantau dan mengawasi pasokan dan harga pangan secara berkala melalui satgas pangan; serta
- Melakukan kerjasama antar daerah khususnya daerah yang defisit atau berpotensi cenderung mengalami gejolak harga pangan

Berikut daftar kebijakan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Barat:

No.	Keputusan	Tentang
1.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (atas nama Gubernur Kalimantan Barat) Nomor : 500.6.7.4/2/DISTPH tanggal 9 Januari 2026	Permohonan Izin Sandar dan Bongkar Kapal Muatan Pupuk Subsidi
2.	Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.1.1/111/DISTPH tanggal 28 Januari 2026	Strategi 4K HBKN Imlek, Bulan Ramadhan dan Idul Fitri
3.	Surat Gubernur Kalimantan Barat Kalimantan Barat Nomor : 500.6.3.3/1/DISTPH tanggal 4 Februari 2026	Gerakan Tanam Cabai di Kabupaten/Kota
4.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/174/DPPESDM-C tanggal 5 Februari 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Mempawah
5.	Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Kalimantan Barat Nomor : 500.1.4.1/1/DISKETPAN-D tanggal 9 Februari 2026	Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
6.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/276/DPPESDM-C tanggal 20 Februari 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Keputusan	Tentang
7.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/277/DPPESDM-C tanggal 20 Februari 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Sintang
8.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/282/DPPESDM-C tanggal 20 Februari 2026	Permohonan Bantuan Pangan
9.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/287/DPPESDM-C tanggal 23 Februari 2026	Data dan Informasi Komoditas
10.	Surat Gubernur Kalimantan Barat Kalimantan Barat Nomor : 500.6.4.4/3/DISTPH tanggal 23 Februari 2026	Dukungan Program Jemput Pangan BULOG bagi Penerima Bantuan Sarana Produksi Pertanian
11.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/298/DPPESDM-C tanggal 24 Februari 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Mempawah
12.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/300/DPPESDM-C tanggal 24 Februari 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Sekadau
13.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/301/DPPESDM-C tanggal 24 Februari 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Sanggau
14.	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.7.1/74/DISBUNAK.D tanggal 25 Februari 2026	Permohonan Dukungan Penyediaan Telur Ayam Ras
15.	Surat Gubernur Kalimantan Barat Kalimantan Barat Nomor : 500.12.12.2/85/RO-EKON tanggal 25 Februari 2026	Penguatan Strategi 4K selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
16.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/350/DPPESDM-C tanggal 26 Februari 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Kubu Raya
17.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/360/DPPESDM-C tanggal 26 Februari 2026	Partisipasi Pada Kegiatan Operasi Pasar

No.	Keputusan	Tentang
18.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/366/DPPESDM-C tanggal 26 Februari 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Landak
19.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/367/DPPESDM-C tanggal 26 Februari 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Mempawah
20.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/368/DPPESDM-C tanggal 26 Februari 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kota Singkawang
21.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/386/DPPESDM-C tanggal 27 Februari 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Bengkayang
22.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/441/DPPESDM-C tanggal 3 Maret 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Kayong Utara
23.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/442/DPPESDM-C tanggal 3 Maret 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Ketapang
24.	Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.2.2/444/DPPESDM-C tanggal 3 Maret 2026	Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten Sambas
25.	Surat Wakil Gubernur Kalimantan Barat (atas nama Gubernur Kalimantan Barat) Nomor : 500.10.8.1/105/RO-EKON tanggal 18 Maret 2026	Pemantauan dan Pengamanan Penyaluran BBM
26.	Surat Gubernur Kalimantan Barat Kalimantan Barat Nomor : 500.10/106/RO-EKON tanggal 19 Maret 2026	Penyampaian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2026

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan I tahun 2026 cukup efektif dalam menahan laju inflasi yang rendah dan tetap berada pada

rentang $2,5 \pm 1\%$. Hal ini tercermin dari angka inflasi Kalimantan Barat hingga akhir Triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar 2,89% (yoy). Namun masih terdapat beberapa catatan dari kerangka 4K yang masih diperlukan penguatan guna menjaga sasaran inflasi tetap terjaga di masa yang akan datang, adapun catatan tersebut sebagai berikut :

Keterjangkauan Harga

- Terdapat potensi kenaikan harga aneka cabai, daging, telur ayam ras dan bahan bakar rumah tangga karena gangguan distribusi dan produksi akibat cuaca, sehingga perlu dilakukan *Monitoring*;
- Diperlukan peranan dari Perumda / BUMDes/Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai agregator dan mini distribution center bahan pokok penting (bapokting);
- Perlu dilakukan pemantauan harga-harga di pasar utama khususnya Pasar Flamboyan (Kota Pontianak) dan Pasar Melati (Kab. Ketapang) yang memiliki nilai konsumsi terbesar di Kalimantan Barat;
- Perlu dilakukan pemetaan tata niaga distribusi bahan pokok di kabupaten/kota Kalimantan Barat;
- Perlu pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) yang lebih intensif;

Ketersediaan Pasokan

- Belum optimalnya perencanaan produksi komoditas pangan unggulan yang terintegrasi, berbasis data, dan selaras dengan kebijakan pusat dan daerah, sehingga berisiko menyebabkan ketidakseimbangan pasokan, fluktuasi harga, dan kerentanan terhadap perubahan iklim;
- Belum adanya pengaturan pola tanam dan pemanfaatan kondisi iklim serta sistem pengairan berbasis data, sehingga menyebabkan ketidaktepatan waktu tanam/panen, risiko gagal panen akibat banjir/kekeringan, serta fluktuasi harga komoditas pangan;
- Masih rendahnya produktivitas dan efisiensi produksi komoditas pangan strategis akibat belum optimalnya penerapan teknologi budidaya, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta kelembagaan petani.
- Masih terdapat beberapa komoditas yang defisit seperti aneka cabai dan aneka bawang;
- Masih tingginya ketergantungan terhadap komoditas pangan impor dan pasokan luar daerah.

Kelancaran Distribusi

- Realisasi penyerapan gabah/beras CBP perlu dipertahankan;
- Pelaksanaan GPM/OP/PM perlu dioptimalkan dari sisi penetapan titik lokasi seperti pasar dan pusat kecamatan, serta memperhatikan penjadwalan kegiatan yang mempertimbangkan periode peningkatan permintaan masyarakat;
- Distribusi komoditas bahan pokok dan penting (bapokting) belum efisien khususnya pada wilayah distribusi yang berjarak jauh dari gudang yang eksisting;
- Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra dan antar provinsi perlu untuk lebih optimal dan berkesinambungan;
- Perlu Dukungan program Keagenan Pengecer Upaya Stabilisasi Komoditi Pangan Krusial (KAPUAS KOMPAK) oleh Bulog
- Terjadi kenaikan biaya logistik dan gangguan rantai pasok dari daerah sentra produksi yang perlu ditangani;
- Terdapat resiko sungai surut akibat El Nino atau kemarau panjang;

Masih terdapat masalah bongkar muat komoditas bapokting yang perlu ditangani;

- Masih terdapatnya masalah ketersediaan BBM oleh PT. Pertamina serta distribusi listrik oleh PLN.

Komunikasi Efektif

- Perlu adanya neraca produksi yang terintegrasi dan komunikasi aktif untuk pemenuhan pasokan antar TPID kabupaten/kota sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing;
- Belum adanya BUMD dan/atau BLUD yang secara khusus berfokus pada pengelolaan bisnis pangan;
- Perlu menjaga ekspektasi inflasi masyarakat serta mendorong pola konsumsi dan belanja yang bijak, termasuk untuk komoditas BBM dan LPG;
- Perlu adanya komitmen Roadmap TPID 2025-2027 dan Forum KAD dengan mapping program kerja OPD dari hulu-hilir, serta sinkronisasi dengan program pemerintah pusat - daerah (Oplah, CSR, Makan Bergizi Gratis, KDKMP);
- Tata kelola stabilisasi harga dan distribusi pangan perlu diperkuat, termasuk pengaturan mekanisme intervensi pasar;
- Terjadinya *panic buying* di masyarakat khususnya pada komoditas BBM akibat kebijakan pembatasan penjualan BBM. Perlu adanya komunikasi yang efektif dari Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa stok komoditas terjaga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam mengendalikan inflasi di daerah, diperlukan sinergi beserta penguatan peran TPID yang dapat dilakukan dengan pendekatan kerangka GNPIP melalui kerangka 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) dengan usulan rekomendasi sebagai berikut:

Keterjangkauan harga

- Monitoring harga aneka cabai, daging dan telur ayam ras, horti daun (al, kangkung, sawi, dan bayam) serta bahan bakar rumah tangga seiring kondisi potensi kenaikan harga serta gangguan distribusi dan produksi akibat cuaca dan dampak karhutla. Mengintensifkan pemantauan pasar khususnya di pasar referensi penghitungan IHK dengan mengikutsertakan aparat penegak hukum;
- Mengoptimalkan peran Perumda / BUMDes/Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai agregator dan mini distribution center bahan pokok penting (bapokting);
- Melaksanakan pemantauan harga-harga di pasar utama antara lain Pasar Flamboyan (Kota Pontianak) dan Pasar Melati (Kab. Ketapang) sebagaimana pangsa nilai konsumsi terbesar di Kalimantan Barat;
- Melakukan pemetaan tata niaga distribusi bahan pokok di kabupaten/kota Kalimantan Barat guna memastikan terjaganya pasokan di masing-masing wilayah;
- Gerakan Pasar Murah (GPM) yang dilaksanakan secara mingguan, sehingga lebih efektif dalam mengelola ekspektasi masyarakat, terutama pada komoditas yang sedang dalam tren peningkatan harga seperti cabai rawit, beras, daging ayam, dan telur ayam.

Ketersediaan pasokan

- Memperkuat perencanaan produksi komoditas pangan unggulan yang selaras dengan Asta Cita, RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, serta GPIPS (Gerakan Pengendalian infiasi dan Pangan Sejahtera) yang diturunkan dalam peta jalan TPID, dengan

pendekatan berbasis data produksi, konsumsi, harga, dan risiko iklim guna menjaga kesinambungan pasokan jangka panjang;

- Melakukan pemetaan masa tanam (jarak masa panen ke masa tanam maksimal 14 hari) dan optimalisasi momentum curah hujan dan dukungan modifikasi cuaca (TMC), didukung pengelolaan sistem pengairan berdasarkan historis bencana banjir dan harga komoditas pangan;
- Meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta penguatan kelembagaan petani guna menciptakan produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan;
- Memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan penambahan volume KAD eksisting untuk komoditas defisit (aneka cabai dan aneka bawang) dengan dukungan fasilitasi distribusi pangan;
- Mendorong peningkatan produktivitas melalui perbaikan kualitas dan ketersediaan benih/bibit unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim, tahan hama, serta sesuai karakteristik lahan, guna memperkuat kapasitas produksi pangan secara berkelanjutan;
- Mendorong diversifikasi produksi dan konsumsi pangan lokal sebagai upaya substitusi komoditas impor dan pengurangan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah.

Kelancaran distribusi

- Mempertahankan penyerapan gabah/beras CBP sesuai target serta mendorong penyaluran beras SPHP secara berkesinambungan melalui perluasan channel penjualan antara lain toko kiosk modern, mini distribution center (Kiosk TPID/Toko Inflasi), dan/atau GPM/OP/PM;
- Meningkatkan efektivitas GPM/OP/PM melalui penetapan titik lokasi strategis (pasar/pusat keramaian lainnya) dan penetapan frekuensi waktu kegiatan dengan memperhatikan periode meningkatnya permintaan masyarakat;
- Mendukung kesinambungan KAD melalui replikasi skema distribusi bahan pangan melibatkan BUMN Logistik, serta mendorong efisiensi distribusi komoditas melalui penambahan gudang transit (Pemda darat atau distributor) terutama di titik distribusi yang jauh dari gudang utama eksisting;
- Keberlanjutan program Keagenan Pengecer Upaya Stabilisasi Komoditi Pangan Krusial (KAPUAS KOMPAK) oleh Bulog untuk beras premium dalam menjaga harga di tingkat konsumen;
- Optimalisasi komponen belanja daerah selain TKD (seperti BTT) untuk:
 - upaya pengendalian inflasi pangan melalui pelaksanaan GPM/OP/PM rutin di Kalimantan Barat;
 - subsidi ongkos angkut untuk bapakting yang terdampak kenaikan biaya logistik dan gangguan rantai pasok dari daerah sentra produksi;
 - upaya perbaikan infrastruktur jalur distribusi darat sebagai substitusi jalur distribusi sungai yang berisiko surut saat El Nino atau kemarau panjang;
- Mendorong prioritas bongkar muat komoditas bapakting melalui BUMN logistik/pelayaran dan otoritas pelabuhan pemasok guna memitigasi dampak *dwelling time* pelabuhan;
- Memperkuat integrasi distribusi energi dan pangan melalui monitoring ketersediaan BBM, LPG, dan listrik guna memastikan kelancaran proses produksi, penyimpanan, dan distribusi komoditas pangan di Kalimantan Barat.

Komunikasi efektif

Meningkatkan kualitas neraca pangan daerah yang terintegrasi antar kabupaten/kota sebagai dasar pengambilan kebijakan serta penguatan implementasi KAD melalui sinergi TPIP-TPID dalam Rakorwil dan HLM yang lebih berbasis data dan proyeksi risiko;

- Mendorong pembentukan BUMD/BLUD yang fokus menangani bisnis pangan dalam rangka meningkatkan penguasaan pasar sekitar 20-30%;
- Memperkuat strategi komunikasi kebijakan melalui pengendalian ekspektasi yang terkoordinasi melalui Forum SIKADA (Sinergi Keuangan Daerah) antara kepala daerah, tokoh masyarakat, dan otoritas terkait guna mengelola ekspektasi inflasi masyarakat serta mendorong pola konsumsi dan belanja yang bijak, termasuk untuk komoditas BBM dan LPG;
- Melanjutkan komitmen peta jalan TPID 2025-2027 dan Forum KAD antara lain KUPONWAH dan SINGBEBASWAH dengan mapping program kerja OPD dari hulu-hilir, serta sinkronisasi dengan program pemerintah pusat daerah (Oplah, CSR, Makan Bergizi Gratis, KDKMP);
- Mendorong pembentukan regulasi daerah yang memperkuat tata kelola stabilisasi harga dan distribusi pangan, termasuk pengaturan mekanisme intervensi pasar yang terukur dan akuntabel;
- Memperkuat strategi komunikasi publik melalui optimalisasi media lokal dan kanal digital resmi TPID, termasuk dashboard inflasi daerah, medai sosial, dan siaran yang kredibel dan rutin guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.